

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Permukiman

Perkembangan permukiman didunia mulai dengan penemuan sistem pertanian melalui pembudidayaan hewan dan tumbuhan. Dengan sistem seperti ini maka manusia mulai hidup berkelompok menetap dan membentuk sistem pemerintahan sederhana. Bentuk dari sistem ini membentuk lingkungan tempat tinggal mereka dan kemudian menjadi awal dari perkembangan permukiman yang menjadi sebuah kota. Terdapat beberapa kejadian penting yang merubah bentuk dan pola kota dari masa lampau hingga saat ini. Menurut beberapa ahli terjadi lompatan kebudayaan menuju pada arah yang belum pernah ada presendennya, lompatan kebudayaan ini didasarkan oleh penemuan sains dan teknologi. Setiap masa juga menghadapi permasalahannya sendiri sehingga membentuk permukiman yang lebih baik.

Permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia untuk menunjukkan suatu tujuan tertentu. Apabila dikaji dari segi makna, permukiman berasal dari terjemahan kata *settlements* yang mengandung pengertian suatu proses bermukim. Dengan demikian terlihat jelas bahwa kata permukiman mengandung unsur dimensi waktu dalam prosesnya. Permukiman sebagai produk tata ruang mengandung arti tidak sekedar fisik saja tetapi juga menyangkut hal-hal kehidupan. Permukiman pada dasarnya merupakan suatu bagian wilayah tempat di mana penduduk tinggal, berkiprah dalam kegiatan kerja dan kegiatan usaha, berhubungan dengan sesama pemukim sebagai suatu masyarakat serta memenuhi berbagai kegiatan kehidupan.

Konsep permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan. Sedangkan perumahan adalah kelompok rumah, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian plus prasarana dan sarana lingkungan. Dalam penentuan lokasi suatu permukiman, perlu adanya suatu kriteria

atau persyaratan untuk menjadikan suatu lokasi sebagai permukiman. Kriteria tersebut antara lain ialah:

1. Tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dandilengkapi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.
2. Bebas dari pencemaran air, pencemaran udara dan kebisingan, baik yang berasal dari sumber daya buatan atau dari sumber daya alam.
3. Terjamin tercapainya tingkat kualitas lingkungan hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni.
4. Kondisi tanahnya bebas banjir dan memiliki kemiringan tanah 0-15% sehingga dapat dibuat sistem saluran air hujan (drainase) yang baik serta memiliki daya dukung yang memungkinkan untuk dibangun perumahan.
5. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat penghuni terhadap tanah dan bangunan di atasnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Tony Atyanto dalam Budihardjo, permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lingkungan di mana manusia tinggal, berkembang serta melangsungkan hidupnya. Sehingga hakekat permukiman adalah lingkungan, sekurang-kurangnya merupakan lingkungan fisik di mana sekelompok masyarakat mempengaruhi dan memanfaatkan lingkungan tersebut. Kegunaan dari sebuah permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk pelayanan, komunikasi, pendidikan dan rekreasi. Terdapat beberapa faktor penyebab pertumbuhan kawasan permukiman di antaranya adalah penambahan jumlah penduduk (*growth of density*) dan urbanisasi (*urbanization*). Adapun terdapat beberapa aspek dalam permukiman di antaranya adalah aspek fisik yang meliputi letak geografis, lingkungan alam dan buatan, serta sarana dan prasarana. Selain itu terdapat aspek non fisik yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan jika Permukiman adalah lingkungan hunian yang meliputi manusia dan alam sekitarnya untuk menunjang kelangsungan hidup sehari-hari. Di mana permukiman dapat memiliki ciri khas tersendiri karena interaksi manusianya.

2.2 Permukiman Atas Air

Kawasan tepi air terjadi karena suatu proses dan hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dengan air, seperti air laut, air sungai dan dana. Kawasan tepian air adalah area yang dibatasi oleh air dan komunitasnya yang dalam pengembangannya mampu memasukkan nilai manusia, yaitu kebutuhan akan ruang publik dan nilai alami. Kawasan tepian air atau *waterfront* adalah kawasan yang dibatasi oleh air dari komunitasnya yang dalam pengembangannya mampu memasukkan nilai manusia, yaitu kebutuhan akan ruang public dan nilai alami. *Waterfront development* sebagai *interface* di sini mengandung pengertian adanya kegiatan aktif yang memanfaatkan pertemuan antara daratan dan perairan. Terdapat 4 prinsip utama dalam mengembangkan Kawasan atas air. Adapun prinsip yang dapat dikembangkan pada kawasan atas air ini berupa konsep, aktivitas, tema, dan fungsi yang dikembangkan. Gambaran prinsip yang digunakan dalam pengembangan Kawasan tepi air berupa:

1. Adanya kerja sama berbagai pihak dalam pengembangan kawasan tepi air sebagai suatu daya tarik pengunjung.
2. Pengembangan konsep tepi air melalui potensi yang ada pada kawasan sebagai suatu daya tarik bagi pengunjung untuk datang ke kawasan tersebut.
3. Pengembangan aktivitas di kawasan tepi air dan menikmati aktivitas di sekitar pelabuhan sebagai sebuah potensi untuk memberikan pengalaman yang berharga bagi pengunjung seperti makan malam, berbelanja.
4. Pengembangan tema pada pintu masuk sungai, danau, menjadi pengembangan aktivitas utama di kawasan tepi air.
5. Pengembangan kawasan tepi air sebagai orientasi rekreasi dapat berupa aktivitas berenang, olah raga dayung, ski air dan fasilitas pendukung lainnya seperti tempat beristirahat, taman, hunian dan perdagangan.

Menurut Keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum No. 45/KPTS/CK/1999 mengenai petunjuk teknis pembangunan perumahan di atas air, adalah sebagai berikut:

1. Rumah di atas air adalah bangunan terapung ataupun panggung yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, yang berada di atas badan perairan berupa sungai, danau, rawa, ataupun pantai atau laut dengan sifat seluruhnya ataupun sebagian selalu ataupun sewaktu-waktu berada di atas air.
2. Lingkungan perumahan adalah sekelompok rumah-rumah dengan prasarana dan fasilitas lingkungannya.
3. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana, meliputi jalan, saluran air bersih, dan pembuangan sampah.
4. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi sosial dan budaya, meliputi fasilitas Pendidikan, kesehatan, niaga dan industri, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, kebudayaan dan rekreasi olahraga dan ruang terbuka.

2.2.1 Persyaratan Teknis Perumahan di Atas Air

Persyaratan teknis untuk permukiman di atas air berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerja Umum No. 45/KPTS/CK/1999 adalah sebagai berikut:

1. Bentuk dan Jenis Bangunan
 - a. Rumah panggung, yaitu susunan ruang yang dibangun di atas tiang yang tertambat pada suatu kaveling yang tetap
 - b. Rumah rakit atau lanting, yaitu susunan ruang yang dibangun di atas rangkaian struktur kayu yang diapungkan di atas perairan yang terlambat pada suatu kaveling tetap
 - c. Rumah tunggal, yaitu rumah dengan bangunan utamanya tidak berhimpit dengan bangunan lain

- d. Rumah gandeng, yaitu rumah dengan salah satu sisi bangunan berhimpit dengan rumah lain atau juga dapat disebut dengan rumah gandeng banyak atau deret

2. Udara dan Cahaya

- a. Bukaannya samping
- b. Semua bukaan yang dapat dipergunakan untuk langsung melihat ke arah terbuka, harus mempunyai jarak sekurang-kurangnya 1 m di atas konstruksi lantai.
- c. Bukaan atas yang pada daerah kepadatan tinggi, harus disediakan bukaan ke arah langit - langit untuk memberikan penerangan dan pertukaran udara, yang di hitung dari bukaan yang terjadi antar batas tritis rumah ke rumah minimal 1 m.

3. Jarak Bangunan

Jarak bangunan rumah satu dengan lain harus berdasarkan atas ketentuan - ketentuan; bahaya kebakaran, ventilasi, cahaya matahari, sirkulasi manusia.

- a. Untuk kaveling lebih kecil atau sama dengan 90 m²
 - Lebar muka kaveling minimum 4,5 m
 - Bila dibangun tidak dengan tritis maka jarak bangunan dengan kaveling adalah minimum 1 m
 - Bila dibangun dengan tritis, maka jarak bangunan dengan batas kaveling adalah minimum 1,5 m
- b. Untuk persil lebih besar dari 90 m²
 - Bila dibangun tidak dengan tritis, maka jarak bangunan dengan bataskaveling adalah minimum 2 m
 - Bila dibangun dengan tritis, maka jarak bangunan dengan batas kaveling adalah minimum 2,5 m

2.2.2 Bentuk dan Struktur Permukiman Atas Air

Berdasarkan bentuk dan strukturnya, dikenal beberapa konsep tentang permukiman atas air yang dapat digunakan sebagai analisis pembentukan atau pertumbuhan ruang kota yang biasanya terbentuk secara alamiah. Berdasarkan eksistensi historisnya, maka pola permukiman di atas air dapat dibedakan atas:

1. Permukiman Tradisional

Permukiman tradisional di atas air memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Homogenitas dalam pola bentuk dan ruang, serta fungsi rumah/bangunan
- b. Adanya nilai-nilai tradisi khusus yang dianut berkaitan dengan huniannya, seperti orientasi, ornamentasi, konstruksi dan lain-lain
- c. Pola persebaran perumahan cenderung membentuk suatu kluster berdasarkan kedekatan keluarga atau kekerabatan

2. Permukiman Non-Tradisional

Pola permukiman non-tradisional memiliki ciri-ciri antara lain:

- a. Heterogenitas atau keragaman dalam pola bentuk ruang, serta fungsi rumah/bangunan
- b. Arsitektural bangunan dibuat dengan kaidah tradisional maupun modern, sesuai dengan latar belakang budaya suku/etnis masing-masing. Segalahal didasarkan pada kepraktisan, kepraktisan dan tidak ada nilai-nilai tradisi khusus yang dianut berkait dengan bangunan.

2.3 Kawasan Pesisir

Sesuai dengan UU No.27 tahun 2007, wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/kota ke arah pedalaman. Menurut kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Menurut Poernomosidhi, Wilayah pesisir merupakan *interface* antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi. Ke

arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Poernomosidhi, dalam Supriharyono, tentang “Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis”). Pengertian wilayah pesisir menurut kesepakatan terakhir internasional adalah merupakan wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*).

Dari pengertian yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir adalah wilayah yang unik karena merupakan tempat percampuran antara daratan dan lautan, hal ini dapat berpengaruh pada kondisi fisik yang mana pada dasarnya daerah ini berada di sekitar laut memiliki kontur yang relatif datar. Keadaan seperti ini dapat mendukung kawasan wilayah pesisir untuk dijadikan daerah yang berpotensi dalam pengembangan wilayah.

Ekosistem wilayah pesisir dan lautan dipandang dari dimensi ekologis memiliki 4 fungsi/peran pokok bagi kehidupan umat manusia yaitu (1) sebagai penyedia sumber daya alam sebagaimana dinyatakan, (2) penerima limbah, (3) penyedia jasa-jasa pendukung kehidupan manusia (*life support services*), (4) penyedia jasa-jasa kenyamanan (*amenity services*).

2.4 Ekonomi Permukiman

Semakin kuatnya daya tarik kota ditambah dengan adanya berbagai keterbatasan secara ekonomi di pedesaan, telah mendorong sebagian besar warga pedesaan untuk mengadu nasib di perkotaan. Perkembangan kota yang pesat tersebut yang berfungsi sebagai pusat kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah pedesaan untuk datang ke perkotaan dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lain termasuk lapangan kerja, sehingga mengakibatkan

penduduk maupun kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan:

1. Terjadinya penambahan penduduk yang lebih pesat dari pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian serta layanan primer lainnya secara layak/memadai;
2. Tumbuhnya kawasan perumahan dan permukiman yang kurang layak huni, yang pada berbagai daerah cenderung berkembang menjadi kumuh, dan tidak sesuai lagi dengan standar lingkungan permukiman yang sehat;
3. Kurangnya perhatian/partisipasi masyarakat akan pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman guna kenyamanan dan kemudahan dukungan kegiatan usaha ekonomi.

Pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, rumah adalah salah satu aset dalam pengembangan kehidupan social dan ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu bidang perumahan dan permukiman merupakan program yang penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional.

2.4.1 Ekonomi permukiman Pesisir

Adanya laju pertumbuhan penduduk yang pesat disertai dengan meningkatnya intensitas pembangunan di segala bidang, menyebabkan permasalahan dan konflik di bidang pertanahan semakin meningkat. Permasalahan utama adalah terbatasnya ketersediaan lahan di kota-kota besar ataupun berkembang. Kondisi yang demikian memberikan alasan bagi orang/sekelompok orang untuk merambah wilayah pesisir atau pantai menjadikannya tempat hunian atau kegiatan usaha, mengingat selama ini wilayah pantai belum banyak tersentuh maupun dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri, rekreasi/wisata, bangunan hotel dan *resort*, permukiman, pertanian dan sebagainya. Sementara itu wilayah pantai merupakan kawasan dengan ekosistem yang khas karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menyangga kehidupan masyarakat pantai sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Kota pesisir menjadi daerah yang paling strategis dan pesat pertumbuhannya, alasannya daerah pesisir

memiliki potensi ekonomi yang tidak hanya memanfaatkan sumber daya darat tetapi juga sumber daya laut. Pesisir memiliki sumber daya yang sangat beragam dan penting bagi kelangsungan suatu peradaban. Sekitar 60% kota yang ada di Indonesia terletak di daerah pesisir. Berbagai aktivitas sosial dan ekonomi membutuhkan lokasi pesisir, dan banyak wilayah pesisir mempunyai nilai lansekap, habitat alam, dan sejarah yang tinggi. Sehingga menjadi magnet yang kuat tak terkecuali untuk pengembangan kota pesisir. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat. Berbagai pembangunan pada kawasan pertumbuhan bukan hanya membawa nilai positif bagi peningkatan perekonomian daerah tapi juga membawa dampak negatif yang muncul.

2.4.2 Ekonomi Permukiman Kumuh

Aspek ekonomi menjadi fundamental dalam terciptanya kawasan kumuh karena mayoritas permukiman kumuh dihuni oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (Ditjen Cipta Karya), mata pencaharian atau pekerjaan akan berbanding lurus dengan penghasilan masyarakat karena pekerjaan tidak hanya apa yang dilakukan manusia untuk hidup, tetapi ada peran dari sumber daya yang menyediakan mereka dengan kapabilitas untuk membangun kehidupan yang memuaskan, faktor beresiko dimana setiap individu harus memperhatikan dalam mengurus sumber daya, lembaga serta hubungan politik juga membantu dan menghalangi dalam tujuan mereka agar dapat hidup dan meningkatkan taraf hidup, dari keterangan umum tentang mata pencaharian tersebut dapat ditentukan bahwa pengertian yang sesuai dengan penelitian mengenai permukiman kumuh, yaitu suatu pekerjaan pokok yang dilakukan manusia untuk hidup dan sumber daya yang tersedia merupakan faktor penting dalam mengelolanya sehingga dalam keadaan apapun akan ada celah dalam memanfaatkan sumber daya tersebut serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Ditjen Cipta Karya mengenai pengembangan kawasan permukiman kumuh dijelaskan bahwa indikator ekonomi yang mempengaruhi terjadinya kawasan permukiman kumuh antara lain:

- Mata pencaharian: pekerjaan merupakan suatu cara untuk mendapatkan penghasilan, jika mata pencaharian tergolong baik dan tetap maka jumlah penghasilan yang didapat menjadi semakin besar.
- Penghasilan: semakin tinggi penghasilan setiap individu masyarakat akan semakin besar pelayanan sarana prasarana lingkungan yang didapat, karena pelayanan sarana prasarana lingkungan membutuhkan sejumlah biaya khusus diluar untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Setelah mata pencaharian sudah terencana dengan baik maka pada umumnya akan berbanding lurus dengan pendapatan bagi masyarakat, jika mata pencaharian sudah dikatakan layak maka pendapatan akan mengikutinya.

2.4.3 Ekonomi Permukiman Pesisir dan Kumuh

Pada permukiman kumuh kawasan pesisir yang berlokasi di tepi badan air seperti tepi sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya banyak perumahan yang berada disepanjang garis sempadan badan air dengan menitikberatkan kepada kearifan lokal tanpa melihat beberapa aspek yang diperlukan dalam mengelola suatu permukiman sehingga tidak menghasilkan lingkungan kumuh. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk maka bertambah pula kebutuhan terhadap prasarana permukiman. Salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah akan permukiman kumuh adalah kawasan pesisir. Keberadaan kawasan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut serta memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya yang tercermin dari besarnya keanekaragaman hayati, potensi budidaya perikanan pantai dan laut. Salah satu prioritas pengembangan di wilayah pesisir di bidang permukiman adalah peningkatan permukiman pesisir. Kawasan kumuh sering kali dipandang sebagai kawasan marginal dan *squatter* dalam perspektif perkotaan. Kawasan ini dianggap mengganggu perkembangan Kota yang lebih fokus pada sektor ekonomi. Pada kawasan pesisir masih memiliki gambaran sebagai daerah yang tertinggal, kumuh, dan kurang tersentuh dikarenakan pengembangan wilayah pesisir yang kurang menjadi perhatian utama.

2.5 Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan strategi dalam memanfaatkan dan menggabungkan faktor internal baik kekuatan maupun kelemahan dan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah baik secara internal maupun eksternal wilayah yang dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya yang sering muncul dengan interaksi dengan wilayah lain. Menurut Mulyanto (2008), pengembangan wilayah adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada, untuk mendapatkan kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat khususnya dalam skala nasional.

Pengembangan wilayah dalam jangka Panjang ditekankan pada pengenalan sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial yang mempertimbangkan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Pendekatan pengembangan wilayah selalu mempertimbangkan aspek keruangan (spasial), sebab setiap satuan ruang mempunyai karakteristik tertentu, yang memerlukan perlakuan berbeda. Oleh karena itu, analisis pengembangan wilayah memerlukan adanya komponen pengembangan wilayah.

Pengembangan wilayah jika dilihat dari sisi ekonomi, secara umum berorientasi pada meningkat atau menurunnya produktivitas wilayah dengan indikatornya adalah jumlah penduduk, pendapatan, kesempatan kerja, dan *additional value* (nilai tambah) dari sektor industri pengolahan. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang sosial, pengembangan wilayah berfokus terhadap tujuan agar terjadinya perubahan dari kondisi yang kurang berkembang menjadi maju yang terjadi secara bertahap yang diharapkan dapat membantu pengembangan daerah. Pengembangan wilayah sebagai suatu bentuk hubungan yang tercipta

antara sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat yang berjalan secara harmonis dengan mempertimbangkan daya tampung. Pada variabel pengembangan wilayah ini, terdapat 3 aspek variabel berupa pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan kepadatan hunian.

1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat disebut juga dengan dinamika penduduk. Dengan artian lain, pertumbuhan penduduk adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang terjadi pada suatu wilayah harus diperhatikan dengan baik, karena akan mempengaruhi perkembangan dari wilayah itu sendiri. Pada dasarnya, pertumbuhan penduduk merupakan suatu fenomena yang sudah pasti terjadi pada suatu wilayah yang dimana akan mempengaruhi jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk sering mengalami perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

a. Angka kelahiran (Fertilitas)

Faktor utama dari pertumbuhan penduduk ialah kelahiran, yang mana pada faktor kelahiran ini bisa membuat suatu pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang tinggi, apabila angka kelahiran lebih tinggi dibandingkan angka kematian.

b. Angka kematian (Mortalitas)

Faktor berikutnya yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ialah faktor kematian. Secara sederhana, angka kematian merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami.

c. Imigrasi

Emigrasi merupakan masuknya penduduk ke suatu daerah yang berasal dari daerah yang lain dengan tujuan untuk bermukim

(menetap) di daerah yang didatangi. Penduduk yang melakukannya disebut dengan imigran.

d. Emigrasi

Emigrasi merupakan suatu kejadian keluarnya penduduk dari suatu daerah menuju ke daerah yang lain dengan tujuan untuk menetap (bermukim) di daerah yang dituju tersebut. Penduduk yang melakukan emigrasi disebut emigran.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya yang dilakukan, karena pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut akan menyebabkan cepatnya penambahan jumlah tenaga kerja, sedangkan kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. Aspek pertumbuhan penduduk dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 parameter yakni pertumbuhan penduduk lambat apabila pertumbuhan $<1\%$, pertumbuhan penduduk sedang apabila pertumbuhan yang terjadi antara $1\%-2\%$ dan pertumbuhan penduduk cepat apabila pertumbuhan $>2\%$.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk biasanya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu tingginya angka kelahiran, rendahnya angka kematian, bentuk lahan, iklim, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan industri, keteraediaan dalam penyediaan sarana prasarana, ketersediaan pusat pendidikan. Meningkatnya angka kelahiran dari tahun ke tahun dan tidak diiringi dengan perluasan wilayah mengakibatkan penduduk semakin padat.

Sedangkan pengertian kepadatan penduduk menurut Sarwono (1992), kepadatan penduduk merupakan suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangnya. Adapun faktor

dari kepadatan penduduk diantaranya yaitu munculnya kawasan kumuh kota dengan kondisi rumah yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan (tidak layak huni), meningkatnya kompetisi di dalam dunia pekerjaan, menurunnya kualitas suatu lingkungan, terganggunya sistem keamanan, meningkatnya angka kemiskinan, serta tingginya angka tingkat kejahatan atau kriminalitas. Menurut Michael Thomas Sadler dalam Mantra (2000), mengemukakan bahwa daya reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk yang ada pada suatu wilayah. Apabila kepadatan penduduk tinggi, maka daya reproduksi manusia akan menurun. Sebaliknya jika kepadatan penduduk rendah, maka daya reproduksi penduduk berbanding terbalik. Berdasarkan buku saku identifikasi dan penilaian lokasi kumuh menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, disebutkan parameter kriteria kependudukan terdiri dari 3 parameter yaitu untuk kepadatan penduduk tinggi apabila metropolis & kota besar memiliki kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >400 jiwa/Ha dan untuk kota sedang & kota kecil kepadatan penduduk pada lokasi sebesar >200 jiwa/Ha, selanjutnya untuk kepadatan penduduk sedang pada observasi lokasi sebesar 151-200 jiwa/Ha, dan kepadatan penduduk rendah pada lokasi sebesar <150 jiwa/Ha.

3. Kepadatan Hunian

Kepadatan hunian adalah salah satu faktor dari suatu kualitas hidup, kepadatan hunian sangat berpengaruh pada keamanan dan kesehatan setiap anggota keluarga dalam setiap rumah. Menurut Mukono (2015), kepadatan penghuni merupakan luas lantai dalam rumah dibagi dengan jumlah anggota keluarga penghuni tersebut. Kepadatan penghuni dalam satu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan *over crowded*. Hal ini tidak sehat karena disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila salah satu

anggota keluarga menderita suatu penyakit infeksi terutama TB paru akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain, karena seorang penderita rata-rata dapat menularkan kepada dua sampai tiga orang di dalam rumahnya.

Kondisi hunian dan permukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin. Secara sosial dan ekonomi, pengembangan wilayah dalam aspek kepadatan hunian biasanya tidak homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat kepadatan yang beranekaragam, begitu juga dengan asal muasalnya. Menurut Diana Margaretha Asa dalam penelitian berjudul “Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan” disebutkan parameter untuk kriteria kepadatan hunian terdiri dari 3 parameter yaitu kepadatan hunian tinggi $>7,2 \text{ m}^2/\text{jiwa}$, selanjutnya untuk kepadatan hunian sedang $5-7,1 \text{ m}^2/\text{jiwa}$, dan kepadatan hunian rendah $3-4 \text{ m}^2/\text{jiwa}$.

4. Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas dasar, peralatan, instalasi yang dibangun dan dibutuhkan untuk mendukung kegunaan suatu sistem tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat. Dalam menciptakan suatu lingkungan permukiman yang baik, maka diperlukan infrastruktur permukiman. Infrastruktur permukiman yang dimaksud adalah jaringan air bersih, sistem drainase, sistem pengelolaan limbah dan sanitasi dan persampahan. Elemen dasar infrastruktur lingkungan perumahan menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Jaringan Jalan

Menurut Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2006 Tentang Jalan, disebutkan jalan adalah prasarana darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan maupun perlengkapan yang ada disekitar jalan diperuntukkan bagi pergerakan lalu lintas baik yang berada di permukaan tanah maupun diatas permukaan tanah kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Klasifikasi jaringan jalan yang terintegrasi antar hierarki maka akan membuat fungsi jalan dari tertinggi yaitu arteri primer dengan terendah yaitu jalan lingkungan dapat berkaitan dengan baik. Pengelompokan Jalan menurut SNI 03-6967-2003 tentang Persyaratan umum sistem jaringan dan geometrik jalan perumahan, terdiri dari:

1. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, dan memiliki lebar jalan ± 8 meter.
2. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, dan memiliki lebar jalan ± 7 meter.
3. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi yang memiliki lebar jalan ± 6 meter.

Menurut SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, menjelaskan bahwa jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah yang memiliki lebar jalan ± 4 meter.

Terdapat empat prinsip yang mengacu pada kebijakan maro pada pembangunan ASIA *Highway* di Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. *Accessibility*: Jaringan jalan harus menjamin aksesibilitas atau kemudahan pengendara luar mencapai wilayah Indonesia tanpa hambatan
2. *Compatibility*: Jaringan jalan harus kompatibel atau cocok dengan jaringan jalan di luar Indonesia
3. *Safety*: Keselamatan lalu lintas harus menjadi perhatian utama
4. *Mobility*: Jaringan jalan juga harus mampu melayani pergerakan lalu lintas kendaraan dengan nyaman

Mengacu pada Pedoman Teknis Prasarana Jalan Perumahan (Ditjen Cipta Karya, 1998) standar perkerasan jalan pada lingkungan 1,5 – 2 meter, bahu jalan 0,5 meter, serta terdapat area damaja, damija, dan dawasja, serta garis sempadan bangunan (GSB) yang mana jalan lingkungan ini diperuntukkan untuk pejalan kaki. Kemudian data yang digunakan pada variabel penelitian kualitas jalan pada lokasi studi apakah sudah baik, mengalami kerusakan ringan, ataupun rusak berat pada jenis permukaannya. Berdasarkan buku saku identifikasi dan penilaian lokasi kumuh menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, disebutkan parameter untuk kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk terdiri dari 3 parameter yaitu 76%-100% area memiliki kualitas permukaan jalan buruk, selanjutnya 51%-75% area memiliki kualitas permukaan jalan buruk, dan 25%-50% area memiliki kualitas permukaan jalan buruk.

b. Jaringan Air Bersih

Jaringan air bersih merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada

kebutuhan rumah tangga. Aman untuk dikonsumsi dan memenuhi standar kesehatan merupakan syarat dari air bersih. Jaringan air bersih adalah tahap pendistribusian air bersih kepada masyarakat serta mencakup komponen pendukung yang ada. Jaringan air bersih di perkotaan di Indonesia pada umumnya dilayani oleh PAM. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, setiap 250 orang dapat menggunakan satu kran umum dengan kapasitas minimal 30 L/orang untuk setiap harinya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) bahwa air bersih yang dapat di konsumsi, ada syarat yang harus dipenuhi, seperti air bersih tidak boleh berasa, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengandung logam berat.

Penyediaan air bersih harus mencakup diantaranya berupa wajib tersedia jaringan kota atau lingkungan hingga menggunakan sambungan yang ada pada setiap rumah, buat pipa yang ditanam di dalam tanah menggunakan pipa PVC, GIP, atau *fiber glass*, dan untuk pipa yang dipasang di atas tanah tanpa perlindungan menggunakan GIP. Sementara dalam Standar Nasional Indonesia perihal baku pelayanan air bersih dimana dapat terlayannya air bersih dari Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) atau sumber lainnya yang dapat tersambung pada setiap tempat tinggal. Kemudian data yang digunakan pada variabel penelitian jaringan air bersih pada lokasi studi berupa air kemasan, PDAM, dan Sumur/Bor/Pompa. Berdasarkan buku saku identifikasi dan penilaian lokasi kumuh menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, disebutkan parameter untuk kriteria pelayanan pemenuhan air bersih terdiri dari 3 parameter yaitu 76%-100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air bersih minimalnya, selanjutnya 51%-75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air bersih minimalnya, dan 25%-50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air bersih minimalnya.

c. Sistem Drainase

Drainase merupakan prasarana yang memiliki fungsi untuk menyalurkan air yang berlebihan dari suatu tempat ke badan air penerima. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT//2014, drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola atau mengendalikan air permukiman, sehingga tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat. Sistem drainase perlu dilakukan. Kondisi drainase ditentukan dengan melihat genangan pada lokasi permukiman, apakah drainase di lokasi kajian sering terjadi genangan atau tidak. Menurut SNI 02-2406-1991 tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan, disebutkan bahwa sistem drainase terdiri dari sistem drainase terpisah dan ganungan ; sistem saluran terbuka dan tertutup. Berdasarkan buku saku identifikasi dan penilaian lokasi kumuh menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, disebutkan parameter untuk kriteria pelayanan pemenuhan sistem drainase lingkungan terdiri dari 3 parameter yaitu 76%-100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, selanjutnya 51%-75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk, dan 25%-50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

d. Sistem Pengelolaan Limbah dan Sanitasi

Limbah sendiri dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair adalah limbah yang bersumber dari air sisa buangan rumah tangga maupun limpahan dari air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah. Untuk pengelolaan limbah cair yang tepat harus dialirkan melalui sumur resapan dan harus diperhatikan agar tidak mencemari sumber air bersih. Sedangkan untuk limbah padat merupakan limbah yang berasal dari

kakus dan sistem pengelolaannya harus dengan cara dibuang ke dalam *septic tank*. Menurut SNI 03-1733-2004, apabila kemungkinan *septic tank* tidak ada, maka lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah lingkungan atau harus dapat tersambung pada sistem pembuangan air limbah kota atau dengan cara pengelolaan.

Berdasarkan buku saku identifikasi dan penilaian lokasi kumuh menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, disebutkan parameter untuk kriteria pelayanan pemenuhan sistem pengelolaan limbah dan sanitasi terdiri dari 3 parameter yaitu 76%-100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis, selanjutnya 51%-75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis, dan 25%-50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis 1.

e. Persampahan

Sampah merupakan barang buangan yang berasal dari sisa rumah tangga. Sampah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sampah organik contohnya sisa makanan, buah-buahan, dedaunan, dan sebagainya. Serta untuk sampah non-organik contohnya adalah plastic, kaleng, keramik, dan kaca. Untuk prosedur pengelolaan sampah dikerjakan menurut tahapannya, mulai dari sampah dibuang ke tong sampah dan selanjutnya di angkut dengan gerobak sampah menuju Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) kemudian dipindahkan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Menurut SNI 19-2454-2002, terdapat teknik operasional pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:

1. Pewadahan sampah
2. Pengumpulan sampah
3. Pemindahan sampah
4. Pengangkutan sampah
5. Pengolahan
6. Pembuangan akhir

Berdasarkan buku saku identifikasi dan penilaian lokasi kumuh menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, disebutkan parameter untuk kriteria pelayanan pemenuhan persampahan terdiri dari 3 parameter yaitu 76%-100% area tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan, selanjutnya 51%-75% area tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan, dan 25%-50% area tidak memiliki sarana dan prasarana persampahan.

2.6 Sosial

Masalah kependudukan bisa juga disebut dengan masalah sosial dikarenakan masalah tersebut terjadi pada lingkungan sosial atau masyarakat. Pada variabel sosial kependudukan ini, terdapat 3 aspek variabel berupa tingkat kriminalitas, tingkat kesehatan dan tingkat pendidikan.

1. Tingkat Kriminalitas

Menurut Astuti (2013), secara sosiologi kriminalitas adalah segala perilaku manusia yang akan menimbulkan banyak kerugian materi psikologi dan mengganggu kehidupan bersama. Kriminalitas akan terjadi kapan saja dan dimana saja dan hal ini harus diantisipasi karena kejahatan sebagaimana menurut ilmu hokum akan menyebabkan kerugian yang sangat besar dan berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Kriminalitas atau kejahatan merupakan masalah yang

sangat umum yang kerap terjadi di masyarakat dimanapun berada, tindakan kriminalitas dapat terjadi di beberapa tempat dengan jangka waktu yang sama ataupun berbeda. Adapun bentuk-bentuk tindakan kriminalitas dapat berupa pencurian, tindak asusila, pencopetan, penjambretan, penodongan senjata tajam/api, penganiayaan, pembunuhan, dan penipuan.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah tingkah laku kejahatan yang melanggar hukum pidana yang ada. Pengertian secara sosiologi adalah meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belumnya ditentukan dengan undang-undang. Kriminalitas terjadi karena beberapa hal diantaranya yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kesenjangan sosial, Kepadatan Penduduk yang tidak merata mengakibatkan susahnyalah lapangan pekerjaan dan menyebabkan banyak orang melakukan tindak pencurian, fanatisme, dan sifat kedaerahan. Menurut Diana Margaretha Asa dalam penelitian berjudul “Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan” disebutkan parameter untuk tingkat kriminalitas terdiri dari 3 parameter yaitu angka kriminalitas tinggi apabila terjadi 5-7 kali/tahun, selanjutnya angka kriminalitas sedang apabila terjadi 3-4 kali/tahun, dan angka kriminalitas rendah apabila terjadi 0-2 kali/tahun.

2. Tingkat Kesehatan

Angka Kesehatan adalah angka yang menunjukkan presentase kesehatan atau keluhan terhadap kesehatan, angka kesehatan sendiri merupakan salah satu indikator utama untuk mengetahui kesehatan yang terjadi di masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya pemenuhan hak-hak dasar rakyat untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pada era otonomi daerah, makna penting bagi pemerintah daerah adalah dituntutnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini salah satunya adalah tingginya angka penderita penyakit menular. Menurut Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor

07/Per/Dep.6/IV/2016, parameter untuk tingkat kesehatan terdiri dari 4 parameter, yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Namun, dalam penelitian ini parameter yang di ambil untuk dijadikan acuan pada tingkat kesehatan yaitu Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010 hanya 3 parameter yaitu memiliki penyakit menular/penyakit tidak menular, memiliki riwayat penyakit keturunan, dan sehat.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu cara untuk dapat membantu agar seseorang dapat menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab baik secara oral maupun susila Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemauan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan(Suhardjo, 2007). Adapun urutan jenjang tingkat pendidikan di Indonesia antara lain:

1. Sekolah Dasar (SD)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan)
4. Perguruan Tinggi

Menurut Diana Margaretha Asa dalam penelitian berjudul “Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan” disebutkan parameter untuk kriteria tingkat pendidikan terdiri dari 3 parameter yaitu mayoritas tidak lulus pendidikan dasar, selanjutnya mayoritas lulus SD/SMP/SMA, dan mayoritas lulus pendidikan tinggi.

2.7 Ekonomi

Pola-pola sosial ekonomi yang berkembang pada saat ini telah mengakibatkan terjadinya eksodus penduduk pedesaan secara besar-besaran, peningkatan penduduk sepertinya terpusat di wilayah perkotaan. Meskipun terdapat peluang ekonomi dan sosial di kota dan terdapat daya tarik yang secara nyata mendasari demografi tersebut, masalah dan tantangan yang ada dalam komunitas perkotaan pun sudah terlihat dengan nyata. Menurut Rikhwanto Suprpto dalam jurnal majalah ilmiah pawitan (2009), aspek sosial ekonomi terdiri dari variabel pendapatan, dan kemiskinan. Struktur sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pendapatan

Tingkat Pendapatan adalah level *income* seseorang yang dinikmati oleh seseorang melalui hasil dari balas jasa yang diterima oleh seseorang. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang yaitu kualitas sumber daya manusia, keadaan sumber daya alam, ketersediaan modal, stabilitas dan kebijakan pemerintah, kesejahteraan masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan dari suatu masyarakat otomatis akan mempengaruhi kemampuan membeli masyarakat tersebut. Penduduk yang memiliki pendapatan rendah biasanya hanya bisa membangun rumah dalam kondisi yang minim. Menurut Diana Margaretha Asa dalam penelitian berjudul “Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan” disebutkan parameter untuk tingkat pendapatan berupa Standar Upah Minimum Regional (UMR) yang mana pada hal ini, peneliti membagi menjadi 3 parameter yaitu pendapatan Rp.1.700.000-Rp.2.500.000/bulan, selanjutnya pendapatan Rp.2.510.000-Rp.3.310.000/bulan, dan pendapatan > Rp.3.324.000/bulan.

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah sebuah presentase jumlah penduduk yang hidup dibawah rata-rata atau dibawah standar yang berlaku, Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah

kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (2004) menerangkan bahwa kondisi yang disebut miskin ini berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu rendahnya tingkat pendidikan, minimnya lapangan pekerjaan, keterbatasan SDA, dan keterbatasan SDM.

Salah satu penerapan konsep dan definisi kemiskinan pernah dilakukan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1999 dengan melakukan pendataan keluarga secara legkap. Pendataan tersebut menggunakan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga. Kriteria tingkat kemiskinan ini dapat dibagi menjadi Pra Sejahtera, Sejahtera 1 dan raskin. Menurut Diana Margaretha Asa dalam penelitian berjudul "Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan" disebutkan parameter untuk tingkat kemiskinan terdiri dari 3 parameter yaitu penerima KK prasejahtera, Sejahtera 1 dan raskin mencapai 20-23%, penerima KK prasejahtera, Sejahtera 1 dan raskin mencapai 12-19%, dan penerima KK prasejahtera, Sejahtera 1 dan raskin mencapai 8-11%.

3. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dapat menjadi salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Status pekerjaan dianggap sebagai cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jenis pekerjaan merupakan berbagai macam atau beragam jenis aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut UU no

13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, terdapat 2 jenis pekerjaan yaitu pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. Pada penelitian ini status pekerjaan sendiri dapat dibedakan menjadi 3 diantaranya tidak bekerja, bekerja tidak tetap dan bekerja tetap.

2.8 Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat di definisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatualiran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang berkembang kegiatan dalam perekonomian menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat tinggi. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan tinggi. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat dari kemakmuran suatu wilayah atau suatu daerah. Suatu daerah akan mengalami pertumbuhan secara ekonomi hanya jika peningkatan kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya secara terukur. Dalam beberapa dekade, pembangunan daerah hanya selalu berupaya untuk memperoleh naiknya pertumbuhan ekonomi tanpa memikirkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat akan merata atau tidak. Tetapi untuk pembangunan selanjutnya para pengambil kebijakan pembangunan daerah telah memutuskan untuk memperhitungkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sehingga tidak hanya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang

tinggi saja namun tingkat pemerataan mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan wilayah mempunyai target untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu variabel keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi.

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1.	Diana Margaret ha Asa (2021)	Penanganan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan	1. Menetapkan upaya penanganan permukiman kumuh yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan	1. Fisik Bangunan 2. Sarana dan Prasarana 3. Legalitas Tanah 4. Lokasi 5. Sosial Kependudukan 6. Sosial Ekonomi	Metode penelitian yang digunakan berupa deskriptif kualitatif pembobotan analisis prospektif partisipatif	Program penanganan yang direncanakan untuk menanggulangi masalah permukiman kumuh di Kelurahan Panggungrejo adalah peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peingkatan infrastruktur publik, dan pengelolaan kawasan sempadan pantai.

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
2.	Mohammad Zaidin (2017)	Pengaruh Pengembangan Perumahan Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Kawasan Pesisir Kelurahan Salekoe Kecamatan Wara Timur Kota Palopo	1.Mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan perumahan terhadap kehidupan masyarakat di wilayah pesisir Kelurahan Salekoe Kota Palopo 2.Mengetahui bagaimana pengaruh tersebut dapat menunjang kehidupan masyarakat pada daerah pesisir Kelurahan Salekoe Kota Palopo	Kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir	Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian kualitatif-kuantitatif atau dikenal dengan metode <i>mixed-methods</i>	Dari hasil uji korelasi, beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dipengaruhi oleh pengembangan perumahan. Aspek tersebut yaitu tingkat pendapatan dan peluang kerja yang berpengaruh kuat dan tingkat pendidikan serta fasilitas kesehatan yang berpengaruh sedang. Dan dalam penelitian ini telah ditemukan aspek kehidupan yang telah dipengaruhi oleh keberadaan perumahan.

No	Penulis	Judul	Tujuan	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
3.	Andi Nurul Haqq (2017)	Tinjauan Pengembangan Kawasan Permukiman Di Belopa Ibukota Kabupaten Luwu	1. Untuk mengetahui pengembangan kawasan permukiman di Belopa Ibukota Kabupaten Luwu 2. Untuk mengetahui strategi pengembangan kawasan permukiman di Belopa Ibukota Kabupaten Luwu	1. Permasalahan permukiman 2. Pola permukiman 3. Faktor internal dan faktor eksternal	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif	Pengembangan kawasan permukiman di Belopa Ibukota Kabupaten Luwu saat ini mengalami permasalahan dan berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi yang digunakan dalam pengembangan kawasan permukiman adalah S-T.

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.10 Sintesa Pustaka

Berdasarkan hasil analisis sintesa teori yang telah disajikan sebelumnya, maka dilakukan kajian sintesa pustaka dari tinjauan pustaka yang selanjutnya digunakan dalam penelitian ini dan penentuan strategi pengembangan wilayah permukiman atas air pada kawasan pesisir Kelurahan Klandasan Ulu guna memacu pertumbuhan ekonomi. Kajian sintesa pustaka ini merupakan hasil penggabungan dari sintesa pustaka yang telah ditampilkan sebelumnya pada sub bab tinjauan pustaka. Dengan hasil kajian tersebut maka ditarik beberapa variabel dan sub variabel terkait kebutuhan pengembangan wilayah permukiman atas air pada kawasan pesisir Kelurahan Klandasan Ulu guna memacu pertumbuhan ekonomi dari strategi dari strategi yang ingin dicapai. Adapun penjabaran hasil sintesa pustaka penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sintesa Teori

No	Sasaran	Variabel	Sub Variabel	Indikator
1.	Mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan wilayah permukiman atas air dalam menunjang kehidupan sosial masyarakat di kawasan pesisir Kelurahan Klandasan Ulu	Pengembangan Wilayah	Pertumbuhan Penduduk	Angka kelahiran, Angka kematian, Imigrasi, dan Emigrasi
			Kepadatan Penduduk	Jumlah penduduk dan Luas wilayah
			Kepadatan Hunian	Luas bangunan dan Jumlah penghuni rumah
			Infrastruktur	Jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi dan persampahan
		Sosial	Tingkat Kriminalitas	Frekuensi tindak kejahatan
			Tingkat Kesehatan	Frekuensi dan jenis penyakit yang melanda masyarakat
			Tingkat Pendidikan	Pendidikan terakhir yang ditempuh
2.	Mengetahui bagaimana pengaruh pengembangan wilayah permukiman atas air dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di	Pengembangan Wilayah	Pertumbuhan Penduduk	Angka kelahiran, Angka kematian, Imigrasi, dan Emigrasi
			Kepadatan Penduduk	Jumlah penduduk dan Luas wilayah
			Kepadatan Hunian	Luas bangunan dan Jumlah penghuni rumah
			Infrastruktur	Jaringan jalan, air bersih, drainase, sanitasi dan persampahan
		Ekonomi	Tingkat Pendapatan	Pendapatan per bulan
			Tingkat Kemiskinan	Jumlah KK prasejahtera, sejahtera 1 & penerima raskin

kawasan pesisir
Kelurahan
Klandasan Ulu

Status Pekerjaan

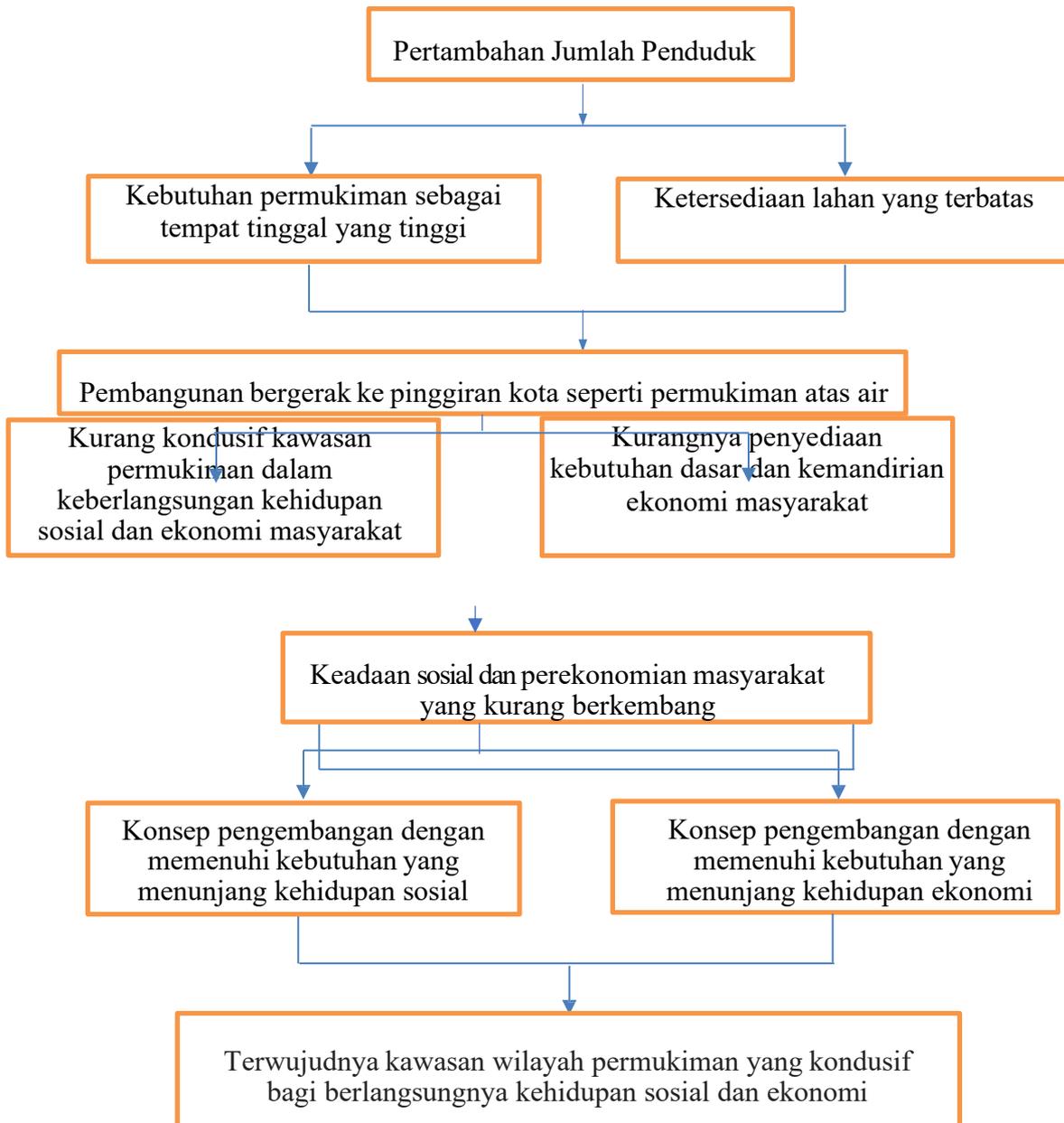
Tidak bekerja, bekerja tidak tetap,
bekerja tetap

Sumber: Hasil Analisis, 2022

2.11 Pola Pikir

Adapun pola pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Pola Pikir



Sumber : Hasil Analisis Penulis , 2023